

## Dari Besuki ke Bondowoso: Perkembangan kawasan *frontier* terakhir di Jawa 1800-1930

Jati Saputra Nuriansyah<sup>1\*</sup>, Intan Aninditya<sup>2</sup>, Moh. Yopi Putra Ramadhani<sup>3</sup>, Hastrida Firdaus Iva<sup>4</sup>, Rizqy Syahrul Romadhon<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5 Malang, 65145, jati.saputra,2007326@students.um.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, intan.aninditya.2007326@students.um.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, moh.yopi.2007326@students.um.ac.id

<sup>4</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, hastrida.firdaus.2007326@students.um.ac.id

<sup>5</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, rizqy.syahrul.2007326@students.um.ac.id

\*<sup>1</sup>Corresponding email: jati.saputra.2007326@students.um.ac.id

### Abstract

*This article describes the development of the Besuki residency as the last frontier area on the island of Java for the period 1800-1930. This writing is motivated by the development of government and the socio-economic life of the people in the Besuki Residency area. The methods used in this study include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The purposes of writing this article are 1) To find out the development of government in Besuki Residency; 2) To describe the economic development in Besuki Residency; and 3) To describe the social conditions of the Besuki Residency community.*

### Keywords

*residency; Besuki; regency.*

### Abstrak

Dalam artikel ini memuat tentang perkembangan Karesidenan Besuki sebagai wilayah *frontier* terakhir di Pulau Jawa periode 1800-1930. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Karesidenan Besuki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu 1) Untuk mengetahui perkembangan pemerintahan di Karesidenan Besuki; 2) Untuk mendeskripsikan perkembangan ekonomi di Karesidenan Besuki; dan 3) Untuk menjabarkan keadaan sosial masyarakat Karesidenan Besuki.

### Kata kunci

karesidenan; Besuki; kabupaten.

\*Received: 28 September 2022

\*Revised: 25 October 2022

\*Accepted: 30 October 2022

\*Published: 31 October 2022

## PENDAHULUAN

Karesidenan merupakan salah satu bentuk pembagian administrasi daerah pada saat Indonesia masih menjadi jajahan Belanda. Wilayahnya terdiri dari beberapa daerah

yang setingkat dengan kabupaten atau *afdeeling* dan dikepalai oleh seorang residen. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles yang ditunjuk oleh pemerintahan Inggris sebagai pemimpin tertinggi di Jawa berhasil mendirikan Karesidenan Besuki (Muarif, 2020). Wilayah ini terdiri atas empat kabupaten (Bondowoso, Panaroeakan, Jember, dan Banyuwangi) yang sering disebut dengan *Oosthoek* dan sudah lama menjadi wilayah perbatasan di Jawa (Nawiyanto, 2003). Sedangkan wilayah bekas Kerajaan Blambangan yang berhasil dikuasai oleh kolonial, masing-masing wilayah tetap di bawah pimpinan pejabat lokal.

Kolonial menganggap bahwa mereka yang menggantikan raja Jawa di Karesidenan Besuki, maka sistem peminjaman tanah (*leenstelsel*) digunakan VOC melalui pemungutan pajak kepada penguasa setempat (Winarni, 2018). Pada masa VOC, dua macam cara digunakan untuk mengelola Besuki yakni dengan menyewakan berbagai bidang tanah yang luas kepada pihak swasta, khususnya penduduk Cina yang kaya, dan wilayah VOC yang diperintah oleh para kepala bumiputera, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Puger (Winarni, 2018).

Karesidenan Besuki adalah salah satu wilayah pertanian yang terkenal dan terkemuka dalam sektor pertanian. Namun, ketika pergolakan politik lokal berlanjut dan Belanda berusaha untuk merebut daerah tersebut, peranan yang dimiliki Besuki mulai surut. Banyak pemilik tanah pertanian meninggal atau bermigrasi ke lokasi lain dan meninggalkan tanah mereka. Hingga pertengahan abad 19, Besuki dikenal sebagai wilayah hutan terluas dan wilayah yang memiliki penduduk paling sedikit. Besuki pun dipandang tidak terlalu penting dalam segi ekonomi dibanding wilayah Jawa yang lain (Nawiyanto, 2012).

Kekuasaan Belanda menyatukan wilayah Besuki hingga membentuk stabilitas politik yang mengakibatkan peningkatan eksploitasi ekonomi, terutama dengan perkebunan kolonial yang dibuka dan dikelola negara (*Cultuurstelsel*) serta swasta sejak tahun 1870. Perkembangan perkebunan komersial di Jawa dianggap sebagai penyebab kemerosotan pertanian rakyat, tetapi hal tersebut tampaknya tidak terjadi di wilayah Karesidenan Besuki melainkan ikut membantu peningkatan produktivitas sektor tersebut.

Wilayah Karesidenan Besuki pada periode 1890-1900 mengalami pertumbuhan penduduk tahunan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk di Jawa secara keseluruhan, yaitu lebih dari tiga persen (Nawiyanto, 2009), walaupun pada periode setelahnya Besuki mengalami pertumbuhan penduduk lebih rendah, namun persentasenya lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Jawa.

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini membahas secara lebih jauh mengenai perkembangan kawasan *frontier* di Jawa dengan fokus pada wilayah Karesidenan Besuki. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai peran dan perkembangan pemerintahan Karesidenan Besuki, bagaimana perkembangan ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat Karesidenan Besuki. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan pemerintahan di Karesidenan Besuki,

menjelaskan perkembangan ekonomi di wilayah Besuki dan menerangkan bagaimana kehidupan sosial masyarakat Karesidenan Besuki. Ruang lingkup waktu (temporal) dalam tulisan ini ditetapkan sejak tahun 1800 dan tahun 1930 ditetapkan sebagai batas akhir dalam kajian ini. Lingkup spasial (tempat) dalam tulisan ini adalah wilayah Karesidenan Besuki.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah dengan melalui empat tahapan yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik, merupakan proses penelusuran dan pengumpulan sumber data ataupun informasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mencari dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau topik yang dibahas. Sumber yang dikumpulkan meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dipakai dalam penulisan artikel ini berupa arsip foto yang diperoleh dari situs seperti *Delpher* maupun KITLV. Sedangkan untuk sumber sekunder yang digunakan meliputi yang berhubungan dengan tema, selain itu juga menggunakan karya tulis seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yakni tahapan menguji dan penyeleksian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan. Tahap ini berfungsi untuk mengetahui sumber yang akan dipakai asli atau palsu serta isinya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Tahap ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah usaha untuk melakukan pemahaman terhadap data yang telah didapatkan. Sumber data yang telah dikumpulkan perlu dipahami agar dapat terhubung dengan sumber data yang lain. Tahap keempat adalah penulisan karya atau historiografi, tahap ini adalah tahap paling akhir dari penggunaan metode sejarah dengan hasil berupa karya sejarah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perkembangan Pemerintahan di Karesidenan Besuki**

Karesidenan merupakan bentuk pembagian administrasi daerah pada saat Indonesia menjadi wilayah jajahan Kolonial Belanda. Wilayah tersebut terdiri dari beberapa *afdeeling* atau wilayah yang setingkat kabupaten yang dikepalai oleh seorang residen. Pembentukan karesidenan secara formal di Pulau Jawa dilaksanakan pada periode pemerintahan Komisaris Jenderal Baron Van der Capellen (1819-1824) (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, hal. 123-124). Pembentukan karesidenan tersebut diatur dalam Peraturan Komisaris Jenderal tanggal 9 Januari 1819 Nomor 3 dalam *Staatsblad* (lembaran negara) Nomor 16 Tahun 1819. Dalam *Staatsblad* tersebut, Pulau Jawa dibagi menjadi 20 karesidenan antara lain: 1) Banten; 2) Jakarta; 3) Bogor; 4) Priangan; 5) Krawang; 6) Cirebon; 7) Tegal; 8) Pekalongan; 9) Semarang; 10) Kedu; 11) Yogyakarta; 12) Surakarta; 13) Jepara dan Juana; 14) Surabaya; 15) Pasuruan; 16) Besuki; 17) Banyuwangi; 18) Madura; 19) Rembang; dan 20) Gresik.

Dalam setiap karesidenan terdapat beberapa kabupaten, dimana kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang bupati. Bupati merupakan pemimpin tertinggi dalam wilayah kabupaten yang bisa disebut sebagai penguasa lokal atau raja-raja kecil di wilayahnya. Dalam konteks ini, bupati berstatus sebagai pegawai kolonial dan memiliki gelar serta pangkat yang dianugerahkan oleh gubernur jenderal. Adapun gelar bupati di Pulau Jawa terdiri dari tiga jenis, yaitu Raden Adipati, Raden Tumenggung, dan Raden Mas Ingabehi. Dalam setiap kabupaten akan ditempatkan tentara dan pos-pos tentara di bawah seorang komandan dengan pangkat dari letnan kolonel hingga kapten dan pangkat komandan tentara tersebut menyesuaikan dari gelar bupati yang menguasai kabupaten tersebut (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, hal. 124).

Karesidenan Besuki merupakan salah satu karesidenan yang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* No. 16 Tahun 1819. Wilayah karesidenan ini berada di bagian timur Pulau Jawa dan juga merupakan titik akhir dari jalan pos Anyer-Panarukan. Wilayah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan perekonomian Hindia Belanda karena merupakan salah satu kota pelabuhan yang terletak di timur. Selain itu, wilayah Karesidenan Besuki juga dilewati oleh jalan Anyer-Panarukan yang mana jalan tersebut merupakan akses utama dalam perhubungan ujung barat dengan ujung timur Pulau Jawa. Tidak hanya itu saja, beberapa daerah di wilayah karesidenan ini memiliki geografis yang menguntungkan untuk sektor perkebunan, sehingga daerah-daerah tersebut bisa disebut sebagai salah satu 'ladang emas'-nya Hindia Belanda.

Dalam wilayah Karesidenan Besuki terdapat beberapa kabupaten, diantaranya yaitu Kabupaten Besuki, Kabupaten Panarukan, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember. Kabupaten Besuki didirikan pada tahun sekitar tahun 1818-1819 bersamaan dengan pembentukan karesidenan di Pulau Jawa. Pada saat itu, wilayah Panarukan masih dibawah Kabupaten Besuki dengan kategori administratif setingkat *afdeeling*. Adapun Bupati Kabupaten Besuki pertama dijabat oleh Raden Adipati Ario Prawira Diningrat (lihat gambar 1). Raden Adipati Ario Prawira Diningrat adalah putra dari Pangeran Aryo Tirtokusumo yang merupakan saudara dari Raja Sumenep yaitu Sultan Pakunataningrat.



**Gambar 1. Raden Adipati Ario Prawira Diningrat, Bupati Besuki Pertama**  
Sumber: Johannes, 1822

Namun, pada tahun 1850 status wilayah Panarukan ditingkatkan dari *afdeeling* menjadi Kabupaten. Bupati pertama Kabupaten Panarukan dijabat oleh Raden Tumenggung Ario (R.T.A.) Soerioamidjojo berdasarkan surat keputusan Nomor 9 tanggal 7 Oktober 1850 (Muarif, 2020; Sutherland, 1973). R.T.A. Soerioamidjojo memiliki nama kecil Kanjeng Pandu dan beliau menjabat Bupati Panarukan dari tahun 1859 hingga 1872. Adapun pusat pemerintahan dari Kabupaten Panarukan terletak di wilayah Situbondo. Setelah tahun 1872 R.T.A. Soerioamidjojo digantikan oleh bupati lain, berikut daftar Bupati Kabupaten Panarukan yang menjabat pada tahun 1859 hingga 1945 di tabel 1.

**Tabel 1. Daftar Bupati Kabupaten Panarukan 1859-1945**

Nama Bupati	Tahun Menjabat
<i>Raden Tumenggung Ario Soerioamidjojo</i>	1859-1872
<i>Raden Tumenggung Ario Soerodipoetro</i>	1872-1885
<i>R.M.T.A. Koesoemodipoetro</i>	1885-1908
<i>R.M.T.A. Poestokopranowo</i>	1908-1925
<i>R.A.A. Soedibiokoesoemo</i>	1925-1945

Sumber: Sutherland, 1973 dalam Notes on Java's Regent Families: Part II

Selanjutnya, Kabupaten Bondowoso sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Besuki dengan status sebagai wilayah *afdeeling*. Akibat dari penambahan penduduk yang signifikan, maka diperlukannya untuk memperluas dan membuka kawasan permukiman baru atau babat alas di wilayah tenggara, yaitu wilayah Blindungan atau yang saat ini dikenal sebagai Bondowoso. Perluasan tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Ronggo Kiai Soeroadikusumo, yang mana babat alas tersebut dipimpin oleh putra angkatnya yang bernama Mas Astrotuno atau Raden Bagoes Asra. Atas jasanya, Raden Bagoes Asra kemudian diangkat sebagai

Demang Blindungan dengan gelar Abhiseka Mas Ngabehi Astrotuno (Anoegrajekti et al., 2018). Kemudian Raden Bagoes Asra diangkat sebagai Bupati Bondowoso pertama dengan Gelar Ronggo Mas Ngabehi Kerto Negoro (Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2022). Berikut daftar Bupati Kabupaten Bondowoso dari Tahun 1819 hingga 1934 dalam tabel 2 dibawah.

**Tabel 2. Daftar Bupati Kabupaten Bondowoso 1819-1934**

<b>Nama Bupati</b>	<b>Tahun Menjabat</b>
<i>Ronggo Mas Ngabehi Kerto Negoro atau Raden Bagoes Asra</i>	1819-1830
<i>Ronggo II Mas Ngabehi Kertokoesoemo atau Djoko Sridin</i>	1830-1850
<i>Regent van Bondowoso Raden Tumenggung Adipati Abdoerahman Wirodipuro</i>	1850-1879
<i>Regent, Hoofd v/a Regent Schap Raden Tumenggung Wondokoesoemo</i>	1879-1891
<i>Regent, Hoofd v/a Regent Schap Kanjeng Raden Tumenggung Ario Adipati Kertosoebroto</i>	1891-1908
<i>Regent, Hoofd v/a Regent Schap RT. Sentot Sastroprawiro</i>	1908-1925
<i>Regent, Hoofd v/a Regent Schap RTA. Tirtohadhi Sewojo</i>	1925-1928
<i>RT. Prodjodiningrat</i>	1928-1934

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2022

Wilayah Kabupaten Bondowoso pada periode tersebut mencakup wilayah Kabupaten Jember yang berstatus *afdeeling*. Sebelumnya, wilayah tersebut dibagi menjadi dua ketika Raffles berkuasa, yaitu Kepatihan Puger (Jember) dan Kepatihan Bondowoso dibawah pemerintahan Kabupaten Besuki. Kemudian setelah ada pemberontakan Ratu Adil oleh Ario Galedak di Kepatihan Puger, maka Kepatihan Puger digabung dengan Kepatihan Bondowoso menjadi *Afdeeling* Bondowoso (Winarni & Widuatie, 2018,). *Afdeeling* Jember sebagai memiliki kondisi yang menurut Belanda kurang strategis membuat wilayah ini kurang mendapat perhatian dan cenderung terisolasi. Cikal bakal Jember menjadi sebuah *regentschap* dimulai ketika perusahaan NV LMOD (*Naamloze Venootschaap Landbouw Maatscappij Oud Djember*) berhasil mengembangkan perkebunan tembakau.

Perkebunan tembakau tersebut menghasilkan keuntungan yang besar hingga Pemerintah Hindia Belanda mulai memperhatikan wilayah Jember. Dari perkebunan tersebut pula, banyak terjadi migrasi penduduk Madura ke Jember. Kemudian, status Jember ditingkatkan dari yang awalnya bergabung dengan Bondowoso kemudian

dipisahkan menjadi *Zelfstandig* Jember yang dipimpin oleh seorang kepatihan. Peningkatan status tersebut dilakukan karena pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan kota yang sangat pesat. Kemudian, pada tahun 1928 status Jember ditingkatkan lagi menjadi *Regent Schap* atau kabupaten dalam *Staatsblad* Nomor 322 Tahun 1928 yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal De Graff pada 9 Agustus 1928 dan berlaku sejak 1 Januari 1929 (Winarni & Widuatie, 2018). Sejak 1 Januari 1929, Jember menjadi Kabupaten dan Bupati Jember pertama dijabat oleh R.T. Ario Notohadinegoro (Kholidi, 2019).

Sistem pemerintahan di Hindia Belanda dari tahun 1800 hingga 1930 banyak mengalami perubahan, termasuk sistem pemerintahan di wilayah Karesidenan Besuki. Pada tahun 1800 hingga 1870, sistem pemerintahan yang berlaku di Karesidenan Besuki merupakan sistem tradisional. Sistem tradisional ini mencakup pada rekrutmen calon pegawai hingga pergantian pejabat atau bupati yang didasarkan pada keturunan dan sistem pengupahan bupati yang menggunakan tanah *lungguh* (Muarif, 2020). Sistem pemerintahan tersebut mulai mengalami perubahan dan modernisasi pada tahun 1870 di seluruh wilayah Hindia Belanda. Kebijakan ini diberlakukan seiring pemberlakuan politik liberal di Hindia Belanda. Modernisasi sistem pemerintahan dilakukan karena Hindia Belanda berusaha untuk mengganti sistemnya yang awalnya sistem tanam paksa menjadi politik liberal dan untuk efisiensi sistem agar bersifat legal dan rasional (Muarif, 2020).

Pada sistem tradisional, pengisian jabatan bupati diprioritaskan kepada anak laki-laki pertama yang dilahirkan oleh istri resmi (bukan selir) seorang bupati. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka bupati dapat menunjuk, meminta, atau menyarankan penggantinya kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, asalkan penggantinya tersebut tidak bertentangan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Pada sistem tradisional ini, bupati bertindak sebagai penguasa tanah di wilayahnya, yang mana bupati harus menyetorkan hasil pajaknya kepada residen. Namun pada sistem yang baru, bupati bertindak sebagai pegawai Pemerintah Hindia Belanda yang diangkat oleh Gubernur Jenderal. Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan terkait pengangkatan bupati. Ada beberapa syarat untuk dapat diangkat menjadi Bupati, diantaranya: 1) lulus diploma dari *Hoofdenschool* atau sekolah khusus calon pejabat; 2) lulus diploma *Klein Ambtenaarsexamen* atau ujian pegawai rendahan; dan 3) Memiliki sertifikat keterangan bahwa pejabat telah mengikuti kursus *Europesche School*.

Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan persyaratan lain untuk menjadi pejabat kabupaten setelah tingkatan pendidikan, keturunan, dan loyalitas. Salah satu syarat tersebut adalah sistem magang yang telah diatur dalam peraturan tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberian pensiun bagi pegawai bumiputra yang ada di Madura dan Jawa. Peraturan ini tertulis dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Nomor 192 Tahun 1887. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa calon pejabat diharuskan untuk melalui tiga tingkatan magang dari A sampai C. Untuk para pejabat yang akan magang ke golongan A, diharuskan magang dari

golongan C atau dari tingkatan paling bawah. Sedangkan untuk calon pangkat bupati harus magang di tingkatan A dahulu atau pernah menduduki jabatan wedana atau patih selama dua tahun dengan predikat baik sekali.

Dikarenakan banyaknya tenaga terdidik di wilayah Hindia Belanda pada masa itu, maka persyaratan untuk mendapatkan pangkat bupati pun ditambah. Salah satunya yaitu calon bupati diharuskan untuk bisa mengerti dan berbicara dalam Bahasa Belanda. Selain itu, ada beberapa syarat khusus yang diberikan kepada calon bupati di beberapa wilayah. Seperti wilayah Bondowoso, Panaroekan, Probolinggo, Kraksaan, Jember, dan Lumajang calon bupati diharuskan untuk mengerti Bahasa Madura dan berwawasan luas terkait orang-orang Madura (Sutherland, 1974). Persyaratan terakhir tersebut sangat menguntungkan bagi keturunan bupati karena mereka merupakan keturunan orang-orang Madura (Muarif, 2020).

Perubahan sistem pemerintahan di wilayah Hindia Belanda ini membuat para pejabat atau bupati untuk beradaptasi agar dapat mempertahankan keturunannya menjadi penguasa wilayah. Sebenarnya, para bupati memiliki ketakutan tersendiri terkait pergeseran sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian atau jaminan kepada anak cucu mereka untuk tetap menjadi pejabat kabupaten. Seiring berjalannya waktu, mereka memahami kebijakan tersebut dan mulai beradaptasi untuk menyiapkan keturunan mereka agar dapat menjadi pejabat kabupaten. Persiapan tersebut dilakukan dengan memberikan perintah kepada anak-anak mereka untuk sekolah serta belajar sesuai dengan kecakapan mereka (Muarif, 2020).

Selain itu dalam pemerintahan modern, posisi bupati adalah pegawai pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah, penghasilan para bupati berasal dari gaji dengan jumlah tertentu. Pada saat sistem birokrasi tradisional, Bupati mendapatkan gajinya dari kepemilikan tanah *bengkok* atau tanah *lungguh* dan *cultuur-procenten* atau bonus saat menyetorkan hasil tanam paksa. Pada birokrasi modern, sistem tanam paksa dihapus dan otomatis *cultuur-procenten* dihapuskan juga. Tidak hanya itu, pada birokrasi modern sistem kepemilikan tanah juga dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda (Winarni, 2018b)

### **Perkembangan Ekonomi Karesidenan Besuki**

Wilayah Karesidenan Besuki pada awalnya dipandang tidak penting oleh pemerintah dikarenakan segi ekonomi yang cukup rendah dibandingkan dengan bagian-bagian Jawa lainnya. Rendahnya ekonomi Karesidenan Besuki disebabkan oleh kekacauan politik lokal serta upaya penaklukan Belanda terhadap Besuki. Dari peristiwa tersebut banyak lahan pertanian atau perkebunan ditinggal oleh pemiliknya dikarenakan meninggal ataupun bermigrasi ke wilayah lain. Pengintegrasian Karesidenan Besuki kedalam wilayah kekuasaan Belanda menjadi ajang kesempatan untuk membuka lahan-lahan perkebunan serta pertanian untuk memperluas perekonomian wilayah Besuki, mulai dari pembukaan perkebunan dan pertanian milik

negara serta pembukaan milik swasta sejak tahun 1870. Wilayah Besuki yang jarang penduduk dan mempunyai lahan kosong yang subur juga menjadi sebuah peluang bagi perluasan lahan.

Jember merupakan kota yang paling pesat perkembangannya dibandingkan dengan kota-kota lain di Karesidenan Besuki. Jember dikenal dengan sebutan *Ootshoek* (Pojok Timur) atau kota yang paling besar dan ramai di ujung timur Jawa. Faktor yang membuat Jember menjadi kota yang paling pesat pertumbuhannya yaitu sistem pertanian partikelir. Sistem partikelir sendiri artinya yaitu sistem lahan yang bukan milik dinas ataupun milik pribadi, namun swasta. Sistem partikelir ini muncul sebagai perubahan dari tanam paksa yang menyebabkan tragedi kemiskinan pada rakyat pribumi.

Sejak kebijakan ekonomi *the system of enterprice*, memunculkan banyak perkebunan swasta serta perubahan sosial ekonomi pada masyarakat Hindia Belanda. Perintis perusahaan perkebunan swasta di Jember ialah seorang *controleur* pertanian Bondowoso yaitu George Birnie yang bekerjasama dengan pengusaha Belanda di Surabaya yaitu A.D. Van Gennep dan dengan pemilik Anemat & Co yang bergerak di bidang usaha jual beli komoditas perkebunan Surabaya yaitu Mr. C. Sandenberg Matthiesen. Pada 21 Oktober 1859, mereka mendirikan *NV Landbow Maatscaapij Oud Djember* (NV LMOD) yang berfokus di sentra perkebunan tembakau. Sejak saat itu, Jember menjadi sentra perkebunan tembakau *Besoeki Na Oogst* sebagai sebutan atau julukan di pasar internasional. Seiring perkembangannya, NV LMOD kemudian mengembangkan usahanya yang sebelumnya hanya berfokus pada tembakau kemudian juga membuka usaha perkebunan kakao, kopi, dan karet (Arifin, 1989).

Usaha yang dijalankan oleh Birnie dan timnya terbukti sangat menguntungkan pihak Belanda dengan sistem perkebunannya. Banyak pemilik modal yang menjadi tertarik dan ingin mengembangkan usaha mereka di daerah Jember. Pemodal-pemodal yang tertarik untuk mengembangkan usahanya di Jember antara lain: (1) *Maatschappij Goemelar* (MG); (2) *Maatsschappij Soember Djeruk* (MSD); (3) *NV Cultuur Maatschappij Zuid Djember* (CMZD); (4) *NV Besoeki Tabaks Maatschappij* (BTM); (5) *NV Tabaks Onderneming Soember Baroe* (TOSB); (6) *NV Tabaks Cultuur Maatschappij Soember Sarie* (CMSS); (7) *NV Landbouw Soekasari* (LS); (8) *HG Grevers Onderneming* (Retno Winarni dkk, 2021: 7). Seiring dengan berjalannya waktu, budidaya tanaman tembakau menjadi populer atau menjadi sebuah komoditas utama adalah hal pertanian. Masyarakat Jember yang tinggal di Jember dan memiliki tanah atau lahan dan menyewakan lahan mereka dengan bekerja sama dengan pemilik perkebunan. Untuk memiliki bangunan atau perkebunan di lahan milik orang, para pemilik modal juga mulai mengajukan hak sewa.

Selain itu, seiring dengan perkembangan usaha perkebunan dan respon dari masyarakat terhadap perkebunan, kebijakan politik agraria pada tahun 1870 yang mengatur struktur pertahanan wilayah jajahan, Belanda memiliki kepentingan terhadap investasi swasta untuk masuk di Hindia Belanda. Maka dari itu, dibuatlah

kebijakan “hak negeri atas sebidang tanah”. Hak tersebut sangat menguntungkan pihak kolonial, namun merugikan masyarakat bumiputera. Hal ini terdapat pada kebijakan politik agraria dalam pasal 1 (Winarni et al., 2021). Selain perkebunan, dalam perkembangan *frontier* pertanian Karesidenan Besuki juga dilakukan oleh bidang pertanian. Kegiatan pertanian menghasilkan komoditas komersial dan substansi untuk pasar ekspor luar negeri. Aneka tanaman dibudidayakan seperti padi dan jagung yang menjadi pasokan utama atau menempati posisi terpenting dalam pasar internasional serta perkembangan ekonomi di Karesidenan Besuki.

Selama periode 1870-1970, pertanian rakyat di Karesidenan Besuki membudidayakan padi sebagai tanaman pangan utama. Secara bertahap *frontier* pertanian masuk ke wilayah pedalaman sebagai proses perluasan usaha penanaman padi dan sebagai sentra-sentra baru dalam produksi beras. Wilayah-wilayah yang termasuk dalam proses ekspansi ini yaitu wilayah Jember dan wilayah Banyuwangi (Nawiyanto, 2012). Dalam perjalanannya, penanaman padi di sawah dan *tegalan* sangat penting, serta terjadi fluktuasi *output* pada tahun 1870-1970 yang dengan dibarengi perbaikan sistem irigasi. Hal tersebut menyebabkan peningkatan hampir enam kali lipat hasil pertanian padi, sejumlah 270.000 hektar pada 1971 dan sebelumnya pada tahun 1870 sekitar 47.000 hektar.

Pada antara tahun 1910 dan 1920 terjadi peningkatan yang paling tinggi mencapai sekitar 600.000 hektar. Kenaikan luasan panen sekitar 45.000 hektar pada tahun 1930-1940 dan 40.000 hektar pada tahun 1961-1971. *Output* yang diperoleh meningkat pula bebarengan dengan data kenaikan sektor produksi tersebut. *Output* pada periode tahun 1910-1920 sebesar 93.000 ton dan 1930-1940 sekitar 124.000 ton (Nawiyanto, 2003). Dalam sistem ekspansi pangan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda memperlihatkan sektor perkebunan yang diekspansi tidak melemahkan pertanian pangan, namun produksinya terus meningkat. Para petani pun juga masih dapat menanam padi pada lahan perkebunan seperti halnya tembakau. Karesidenan Besuki dijadikan lumbung pangan di Hindia Belanda tidak lepas dari kemunculan pusat produksi beras di Banyuwangi dan Jember.

Tidak hanya padi, namun tanaman hortikultura seperti jagung, ketela, ubi, kedelai, dan berbagai jenis palawija juga ditanam. Jagung di Besuki juga memiliki peran penting dalam perekonomian. Namun, penanaman jagung tidak menyebar merata. Di Bondowoso terdapat 30.000 hektar dan Panarukan terdapat 35.000 hektar pada tahun 1903 serta di Jember sekitar 21.000 hektar. Pada tahun 1920 pusat produksi jagung masih terletak di Bondowoso dan Panarukan dan pada 1970-an, produksi jagung di Jember meningkat drastis melebihi luas pusat produksi (Nawiyanto, 2012).

Keberhasilan dalam bidang usaha pertanian serta perkebunan tidak lepas dari sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Dengan dibangunnya sistem irigasi yang baik maka usaha pertanian dan perkebunan memiliki kualitas yang tinggi. Tujuan lain dari perbaikan sistem irigasi ini juga untuk mensejahterakan masyarakat pribumi dan melanjutkan surplus pertanian untuk kepentingan ekonomi Belanda dan

pengusaha swasta. Pembangunan irigasi dilakukan sekitar tahun 1880an (Wulandari, 2008).

Keberhasilan dalam usaha perkebunan serta pertanian tersebut juga memaksa terlahirnya kota baru di wilayah Karesidenan Besuki, khususnya Jember yang menjadi Kota Jember yang pada awalnya merupakan kawasan yang kecil serta terisolir. Pengembangan kota oleh pemerintah Kolonial bertujuan untuk memperlancar serta mendorong peningkatan perekonomian, memindahkan kota, serta menjaga stabilitas sosial. Salah satu upaya pemerintah Kolonial dalam pembangunan kota yaitu pembangunan jalan. Jalan merupakan unsur penting dalam memperlancar perekonomian. Jalan mempermudah akses tempuh perjalanan ke berbagai lokasi usaha. Jalan di Jember dihubungkan dengan Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan untuk membuka langsung akses ke Surabaya. Pada tahun 1880-1890 jalan sepanjang 30-40 km dibangun oleh NV LMOD yang menghubungkan antara kantor NV LMOD di Jember dengan perkebunan-perkebunan di Distrik Mayang, Gambirono, Wuluhan, Puger, Tanggul (Wulandari, 2008).

Pembukaan jalur kereta api juga menjadi salah satu unsur penting bagi perkembangan ekonomi. Tujuan lain dari pembangunan jalur kereta api yaitu memperlancar angkutan dan pengiriman produk-produk perkebunan dari sentra produksi. Pembukaan jalur kereta api meningkatkan mobilitas sosial yang bersifat horizontal secara besar-besaran mulai dari orang Belanda, Jawa, Madura, Cina, dan Arab (Surjomihardjo, 2008). Jalur kereta api awal dibuka dari Surabaya, Probolinggo, hingga ke Jember pada tahun 1987. Lalu pembangunan jalur kereta api diteruskan lagi mulai dari Jember yang menghubungkan ke Panarukan dan Banyuwangi. *Basoekicsh Proofstation* didirikan di Jember yang menjadi tempat pusat penelitian kopi dan kakao. Lembaga ini merupakan lembaga penting untuk meningkatkan kualitas produk kopi dan kakao (Sasmita, 2019). Demi kesehatan masyarakat, pemerintah kolonial juga mendirikan *Djembersche Klinik*. Tujuan dari pembangunan *Djembersche Klinik* ini yaitu agar rakyat pribumi tetap dalam kondisi prima dan produktif dan para pekerja tetap mampu melakukan pekerjaannya dan memberikan keuntungan ekonomi secara maksimal bagi para pengusaha partikelir tersebut.

### **Keadaan Sosial Masyarakat Karesidenan Besuki**

Besuki menjadi karesidenan di Pulau Jawa dengan penduduk migran tertinggi, baik migran permanen ataupun migran musiman selama periode kolonial. Terdapat tiga fase utama dalam perluasan *frontier* pemukiman di Besuki. Fase pertama sebelum tahun 1870 dan fase kedua pada tahun 1870-1900 ditandai oleh peranan dominan migran Madura dan migrasi ke arah selatan. Sejak abad ke-19 mayoritas migrasi berasal dari Madura, mereka bermigrasi ke Besuki didorong oleh dua faktor utama. Pertama, tidak tersedianya sumber daya alam (SDA) untuk menopang kehidupan, yang disebabkan gersangnya lahan dan jenis tanah yang terdiri dari deposit kapur dan batu

tersier yang tidak cocok sebagai lahan bercocok tanam di sekitaran permukiman yang padat yang jauh berbeda dengan Pulau Jawa.

Kedua, para penguasa Madura yang membebankan wajib militer dan layanan kerja berlebihan kepada masyarakat (Nawiyanto, 2009). Fase ketiga dimulai sekitar tahun 1900, ditandai dengan peranan besar migran Jawa dan migrasi ke arah timur. Arus migran Jawa terjadi karena konversi lahan sawah yang diperluas menjadi perkebunan tembakau. Orang Jawa dinilai lebih cocok dan memiliki pengalaman bekerja di lahan sawah menurut penguasa perkebunan, dibandingkan dengan orang Madura yang berpengalaman di lahan tegalan (Nawiyanto, 2012).



**Gambar 2. Peta asal usul migrasi tetap ke Besuki 1930 berdasarkan urutan dari yang terbesar**  
Sumber: Nawiyanto, 2009

Secara geografis, Besuki sangat menguntungkan untuk pertanian serta terdapat sungai-sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi, sehingga hal ini membuat pengusaha Belanda tertarik untuk membuka usaha di Besuki. Persewaan tanah pada tahun 1892 ada sekitar 29.000 bau dan tahun 1902 mencapai 570.000 bau yang disewakan oleh pengusaha untuk dijadikan lahan penanaman dan perkebunan serta memberikan peluang bagi para imigran untuk mempunyai lahan pertanian dan pemukiman. Perkebunan Indonesia sendiri telah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tiba ke Indonesia. Hal ini menjadikan salah satu sisi sejarah yang memiliki efek relatif luas bagi bangsa Indonesia untuk waktu yang panjang. Perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja mengakibatkan perpindahan orang Madura ke Jawa semakin membesar seiring berjalannya waktu.

Hal ini dikarenakan penduduk setempat yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan pekerja perkebunan, sehingga kebutuhan tenaga kerja didatangkan orang-orang dari luar daerah oleh para pengusaha (Sasmita, 2019). Keuntungan banyak yang diperoleh di Besuki tersebar dan membuat menarik minat etnis Madura, Jawa dan etnis lainnya untuk melakukan migrasi ke Besuki. Sehingga karesidenan Besuki dihuni oleh etnis Madura, Jawa dan Osing. Orang-orang Madura bermukim di sekitar wilayah pantai di Besuki dan Panarukan, Situbondo, Bondowoso dan Jember Utara.

Sedangkan orang-orang Jawa bermukim di Jember Selatan terutama di daerah Puger dan Distrik Genteng, Banyuwangi, serta penduduk asli Banyuwangi atau Osing bermukim di sebagian besar wilayah Banyuwangi (Arliana, 2020). Karesidenan Besuki menjadi daerah transit dari beragam orang karena lancarnya transportasi pelabuhan-pelabuhan. Hal ini membawa pengaruh kebudayaan di masyarakat semakin beragam. Pada tahun 1859 terjadi migrasi etnis Arab ke Besuki hingga pada awal tahun 1881. Akhirnya etnis Arab memutuskan untuk bermukim dan membentuk koloni tempat tinggal di Jalan Tole (sebuah jalan yang strategis berdekatan dengan sungai besar dan daerah pantai pesisir Besuki sebagai pusat perdagangan) setelah lama berdagang di wilayah pesisir.

Mereka membawa kebudayaan Islam yang dapat diterima oleh masyarakat Besuki, sehingga banyak dari masyarakat Besuki yang menganut agama Islam. Orang Jawa dan orang Madura pada umumnya memeluk agama Islam, sementara orang Osing dianggap sebagai sub etnis Jawa yang mayoritasnya memeluk agama Hindu. Etnis Arab pada awalnya hanya mengenal dan hidup berdampingan dengan etnis Madura. Etnis Arab mulai berinteraksi dan berhubungan baik dengan etnis Madura sehingga dari kebiasaan tersebut membuat saling mempengaruhi dan dekat baik dalam bidang sosial maupun kebudayaan. Adanya interaksi yang dekat antara etnis Madura-Arab saat menimbulkan keinginan untuk memperkuat kembali persaudaraan yang sudah ada.

Seperti di Besuki, orang Madura menganggap orang Arab sebagai golongan istimewa keturunan Nabi Muhammad. Para bangsawan dan masyarakat untuk menikahkan anak perempuannya dengan para pedagang Arab karena keistimewaan garis darah serta dikenal sebagai orang yang jujur dan sholeh sehingga dapat diterima dalam kehidupan etnis Madura. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cepatnya etnis Arab diterima di tengah-tengah masyarakat asli Besuki yakni etnis Madura, yaitu: 1) Adanya kesamaan agama, yakni Islam; 2) Kemampuan orang-orang Arab Hadrami untuk menghayati nilai-nilai Budaya dan aspirasi masyarakat, serta kesediaannya untuk menyatukan geraknya dengan jalannya sejarah; dan 3) Perkawinan campuran antara orang-orang Arab Hadrami dengan penduduk pribumi.

Kebudayaan baru yang diperkenalkan mereka dapat diadopsi sehingga dapat diterima oleh etnis Arab dan Madura. Namun dalam interaksi sosial, orang Arab cenderung berinteraksi dengan kelompoknya untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat Arab dan memberikan pemahaman kepada istri dan anak-anaknya tentang budaya Arab. Hal ini tidak dipermasalahkan oleh orang-orang Madura yang berkarakter kuat, namun rasa saling menghormati yang tinggi terhadap orang Arab yang menikah dengan keluarga mereka (Firdausya, 2015).

Hidup berdampingan melalui hubungan pernikahan pada akhirnya menjadikan etnis Arab sebagai orang Indonesia. Mereka tidak hanya menambah keragaman budaya, namun kehadiran orang Arab juga memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial ekonomi di wilayah Besuki, terutama Situbondo. Harapannya dari proses percampuran kedua budaya yang berbeda ini, dapat menjadi peraga untuk membina hubungan baik

dengan kelompok lain untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, damai, dan memiliki rasa hormat antar masing-masing kelompok. Dari segi kesenian terdapat wayang topeng corak Madura yang menyebar di daerah yang sebagian besar penduduknya orang Madura yaitu daerah Bondowoso, Panarukan dan Kraksaan. Selain itu terdapat pula pertunjukkan wayang topeng corak Jawa yang juga banyak dijumpai. Terdapat pula kebiasaan yang awalnya dari kebiasaan orang Jawa yaitu "mele'an" tetapi bisa menjadi kebiasaan etnis lainnya di Karesidenan Besuki yang biasanya dilakukan saat kelahiran bayi, acara pernikahan, orang meninggal, dan lain-lain (Arliana, 2020).

### KESIMPULAN

Karesidenan merupakan bentuk pembagian administrasi daerah yang terdiri dari beberapa kabupaten pada masa Kolonial Belanda. Karesidenan Besuki merupakan salah satu karesidenan yang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* No. 16 Tahun 1819 yang wilayahnya berada di ujung timur Pulau Jawa dan titik akhir jalan pos Anyer-Panarukan. Wilayah Karesidenan Besuki terdiri dari Kabupaten Besuki, Kabupaten Panarukan, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember. Pengintegrasian Karesidenan Besuki ke dalam wilayah kekuasaan Belanda menjadi ajang kesempatan untuk membuka lahan-lahan perkebunan serta pertanian untuk memperluas perekonomian wilayah Besuki, mulai dari pembukaan perkebunan dan pertanian milik negara serta pembukaan milik swasta sejak tahun 1870. Besuki menjadi salah satu karesidenan di Jawa dengan penduduk migran tertinggi, baik migran permanen ataupun migran musiman selama periode kolonial. Pada saat itu penduduk setempat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pekerja perkebunan, sehingga membuat para pengusaha perkebunan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mendatangkan orang-orang dari luar daerah.

### DAFTAR RUJUKAN

- Anoegrajekti, N., Saputra, H. S. P., Maslikatin, T., & Sudartomo, M. (Ed.). (2018). *Sastra dan perkembangan media*. Penerbit Ombak. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/AinulLatifah-101810401034.pdf?sequence=1>
- Arifin, E. B. (1989). *Emas hijau di Jember: Asal usul, pertumbuhan dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat 1860-1980*. Universitas Gajah Mada.
- Arliana, P. (2020). *Pendidikan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Karesidenan Besuki tahun 1901-1942. (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember)*.
- Firdausya, A. R., Sugiyanto, & Sumardi. (2015). Perkembangan kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat keturunan etnis. *Digital Repository Universitas Jember*. Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Jember.
- Johannes, A. (1822). *Portret van de regent Raden Adipati Aria Prawira Adiningrat van Besuki, Oost-Java*. Rijks Museum. <https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP->

T-1999-154

- Kholidi, S. (2019). *Sejarah kelahiran Kabupaten Jember*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/vstory/sejarah-vstory/1170294-sejarah-kelahiran-kabupaten-jember%0A>.
- Muarif, S. (2020). Strategi regenerasi kekuasaan oleh Bupati-Bupati di Panaroean Jawa Timur 1870-1942. *Humaniora Dan Era Disrupsi*, 1(1), 696–708.
- Nawiyanto. (2003). *Agricultural development in a Frontir Region of Java: Besuki 1870 the early 1990s*. Galang Press.
- Nawiyanto. (2009a). Migrasi, perluasan frontier pemukiman, dan perubahan demografis: Karesidenan Besuki, 1870-1970. *Naditira Widya*, 3(1), 122.
- Nawiyanto. (2009b). Pertumbuhan penduduk Besuki: Kajian demografis historis. *Jurnal Humaniora*, 21(2).
- Nawiyanto. (2012). Berakhirnya frontir pertanian: Kajian historis wilayah Besuki, 1870-1970. *Masyarakat & Budaya*, 14(1), 77–98.
- Nawiyanto, N., & Jember, U. (2020). *Agricultural development in a frontier region of Java : Besuki , 1870 - the early A* Sub-Thesis Submitted for the Degree of Master of Arts ( Asian Studies ) At The Australian National University. January 2000.
- Pemerintah Kabupaten Bondowoso. (2022). *Bupati dan wakil bupati*. Kabupaten Bondowoso. [bondowosokab.go.id/bupati-dan-wakil-bupati](http://bondowosokab.go.id/bupati-dan-wakil-bupati).
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. (1978). *Sejarah daerah Jawa Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://play.google.com/books/reader?id=Jf57CgAAQBAJ&pg=GBS.PP1&hl=id>
- Sasmita, N. (2019). Menjadi Kota Definitif. *Historia*, 1(2), 154–170.
- Surjomihardjo, A. (2008). *Kota Yogyakarta tempo doeloe : Sejarah sosial 1880-1930*. Komunitas Bambu.
- Sutherland, H. (1973). Notes on Java's Regent Families: Part II. *In Indonesia* (Vol. 16). <https://doi.org/10.2307/3350649>
- Winarni, R. (2018a). Maduranisation native government bureaucracy elite in Besuki Residency 1818-1942. *Paramita: Historical Studies Journal*, 28(2), 152–163.
- Winarni, R. (2018b). Raja kecil yang menjadi pegawai pemerintah: Pasang surut penghasilan para bupati di Karesidenan Besuki pada periode 1870-1930-an. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 1(1), 104–130.
- Winarni, R., Widuatie, M. R. E., Aprianto, T. C., & Sasmita, N. (2021). Perkembangan Perkebunan Partikelir di Jember (1850-an - 1930-an). *Historia*, 4(1), 437–460.
- Winarni, R., & Widuatie, R. E. (2018). Jember ' s development from the traditional authority to modern government. *Tawarikh Journal of Historical Studies*, 10(1), 15–30. [www.journals.mindamas.com/index.php/tawarikh](http://www.journals.mindamas.com/index.php/tawarikh)
- Wulandari, D. S. (2008). *Irigasi di Afdeeling Bondowoso tahun 1880an sampai tahun 1920an*. Universitas Airlangga. [https://repository.unair.ac.id/108048/4/4.BAB I.pdf](https://repository.unair.ac.id/108048/4/4.BAB%20I.pdf).